

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan sistem ekonomi syari'ah di Indonesia saat ini semakin pesat, salah satunya ditandai dengan pertumbuhan bank-bank syari'ah di Indonesia. Keberadaan Bank Syari'ah semakin kuat dengan terbentuknya peraturan pemerintah yang mengatur Perbankan Syari'ah.

Bank Pembiayaan Rakyat Syari'ah adalah perbankan yang didirikan untuk melayani Usaha Mikro dan Makro. Berdasarkan prinsip syari'ah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.<sup>2</sup> Perbankan syari'ah mempunyai beberapa aplikasi pembiayaan salah satunya yaitu *murābahah*,<sup>3</sup> Menurut ketentuan Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor : 04/DSN-MUI/IV/2000 mengenai *murābahah* bahwa barang yang diperjualbelikan dalam akad pembiayaan *murābahah* tidak diharamkan oleh syari'at Islam, hal ini diperbolehkan asal tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syari'ah.<sup>4</sup>

Dalam pasal 55 UU Nomor 21 Tahun 2008 mengenai Perbankan Syari'ah dijelaskan bahwa ayat (1) penyelesaian sengketa perbankan syariah dilakukan oleh Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama. (2) dalam hal perkara

---

<sup>2</sup> Debby. Permana, (Pembiayaan BPR Syariah dalam Peningkatan Kesejahteraan UMKM : Berdasarkan Maqashid Sharia), *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, Tahun 2017, Vol.3, No.1, hlm. 51.

<sup>3</sup> Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2009), hlm. 79

<sup>4</sup> Abdul Ghofur Anshori, *Payung Hukum Perbankan Syariah (UU Di Bidang Perbankan, Fatwa DSN-MUI dan Peraturan Bank Indonesia)*, (Yogyakarta: UII Press, 2009), hlm. 123.

pihak telah memperjanjikan penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penyelesaian dilakukan sesuai isi akad. (3) penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak boleh bertentangan dengan prinsip syariah.<sup>5</sup>

Semakin berkembangnya zaman, konflik dan sengketa yang terjadi di perbankan syariah semakin beragam dan banyak jumlahnya yang menuntut pemecahan dan penyelesaian. Salah satu kasus yang terjadi adalah sengketa di BPRS AL-Mabrur dalam akad murabahah. Tri Suyatmi dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama diri sendiri yang telah mendapat persetujuan suami Panut Basuki, untuk selanjutnya disebut juga Nasabah. Nasabah telah mengajukan permohonan kepada BPRS Al Mabrur untuk membeli tanah, dan berdasarkan permohonan Nasabah tersebut BPRS Al Mabrur menyetujui, dan dengan akad *murābahah* ini mengikat diri untuk membiayai seluruh harga pembelian, menyediakan dan selanjutnya menjual tanah tersebut kepada Nasabah sesuai dengan ketentuan yang ada diakad *murābahah*. Selanjutnya kedua belah pihak sepakat untuk membuat dan menandatangani akad *murābahah* ini.

Kemudian Nasabah melanggar ketentuan/ ingkar janji terhadap akad *murābahah* yang telah disepakati, Nasabah berjanji melakukan pembayaran angsuran sesuai dengan jadwal angsuran yang telah ditetapkan, Nasabah sepakat dan setuju untuk melakukan pembayaran sesuai dengan jadwal angsuran tiap bulannya hingga akad tersebut jatuh tempo. namun pada kenyataannya Nasabah tidak melaksanakan kewajibannya tersebut. Terjadi

---

<sup>5</sup> Edi Hudiata, *Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah*, (Yogyakarta: UII Press, 2015), hlm. 76-77.

perselisihan didalam melaksanakan akad ini, maka Nasabah dan BPRS Al Mabrur berusaha untuk menyelesaikan secara musyawarah. Dalam hal usaha menyelesaikan perbedaan pendapat melalui musyawarah tidak menghasilkan keputusan yang disepakati kedua belah pihak, maka dengan ini Nasabah dan BPRS Al Mabrur sepakat untuk menunjuk dan menetapkan serta memberi kuasa kepada kantor Pengadilan Agama Klaten untuk memberikan putusannya, bahwa pendapat hukum atau putusan yang ditetapkan bersifat final dan mengikat.

Pengadilan Agama Klaten pada tanggal 1 Agustus 2018 di kepaniteraan menerima gugatan tentang pemenuhan kewajiban akad pembiayaan *murābahah* dengan nomor perkara 1135/Pdt.G/2018/PA/Klt yang diajukan oleh PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Al Mabrur, yang berkedudukan hukum di Jalan Raya Klaten-Solo Km 04, Kerubaru, Belangwetan. Klaten utara, dalam hal ini diwakili oleh Arifin Hidayat, SE. Dalam kedudukannya selaku direktur utama PT BPRS Al Mabrur. Disini mereka menggugat Tri Suyatmi dan Panut Basuki selaku Nasabah. Dalam amar keputusan pengadilan mengabulkan gugatan untuk seluruhnya, menyatakan demi hukum perbuatan tergugat waprestasi/ingkar janji kepada penggugat.

Dari pemaparan diatas, maka penulis tertarik untuk mengadakan penelitian lebih lanjut mengenai “ Penyelesaian Sengketa Akad Murabahah di BPRS Klaten ( Analisis Putusan Pengadilan Agama Klaten nomor 1135/Pdt.g/2018/PA.Klt) ”.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka penulis akan merumuskan masalah, antara lain:

1. Apa pertimbangan hakim Pengadilan Agama Klaten dalam menyelesaikan perkara nomor 1135/Pdt.g/2018/PA.Klt tentang wanprestasi akad *murābahah* di BPRS Klaten?
2. Apakah keputusan hakim Pengadilan Agama tentang wanprestasi akad *murābahah* di BPRS Klaten sudah sesuai dengan Fatwa DSN-MUI?

## **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui pertimbangan hakim Pengadilan Agama dalam menyelesaikan perkara nomor 1135/Pdt.G/2018/PA.Klt tentang wanprestasi akad *murābahah* di BPRS Klaten
2. Untuk mengetahui kesesuaian antara putusan hakim Pengadilan Agama tentang wanprestasi akad *murābahah* di BPRS Klaten dengan Fatwa DSN-MUI.

## **D. Manfaat Penelitian**

1. Bagi Penulis

Penulis dapat Menambah dan memperluas wawasan serta ilmu pengetahuan khususnya tentang penyelesaian akad *murābahah* di Pengadilan Agama Klaten.

2. Bagi Akademik

Sebagai aset pustaka yang diharapkan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan yang berharga, baik mahasiswa dalam memberikan

informasi maupun dosen, mengenai proses penyelesaian akad *murābahah* di Pengadilan Agama Klaten.

### 3. Bagi Masyarakat

Sebagai informasi dan menambah keyakinan dalam pemecahan suatu masalah mengenai proses penyelesaian sengketa akad *murābahah*.

### 4. Bagi Pengadilan Agama Klaten

Hasil penelitian ini dapat menjadi tambahan wacana pemikiran kepada praktisi hukum tentang penyelesaian sengketa dalam ranah hukum terutama penyelesaian sengketa akad *murābahah*.

## E. Metode Penelitian

### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field study research*) yang bermaksud mengumpulkan data secara langsung.<sup>6</sup> Dalam hal ini yang menjadi objek penelitian ialah putusan perkara nomor 1135/Pdt.g/2018/PA.Klt. Tentang akad *murābahah* di Pengadilan Agama.

### 2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif yang bersifat evaluatif. Metode evaluatif bertujuan untuk mengukur manfaat dan kegiatan tertentu, serta mengumpulkan dan menganalisis data secara sistematis untuk menentukan nilai atau manfaat pada isi berkas putusan nomor 1135/Pdt.g/2018/PA.Klt. Tentang akad *murābahah* di Pengadilan Agama.

---

<sup>6</sup> Supardi, *Metodologi Penelitian Ekonomi dan Bisnis* (Yogyakarta: UII Press, 2005), hlm. 34.

### 3. Lokasi Penelitian

Penelitian yang dilakukan oleh penulis yaitu di Pengadilan Agama Klaten yang beralamat di Jalan Kyai Haji Samanhudi No.9, Ngentak, Mojayan, Jawa Tengah.

### 4. Jenis Data

Jenis data penelitian ini mengacu pada data primer dan data sekunder. Data *primer*, atau data tangan pertama, adalah data yang diperoleh langsung. Data *sekunder* atau data tangan kedua adalah data yang diperoleh dari pihak lain, tidak langsung diperoleh oleh peneliti.<sup>7</sup> Adapun penelitian primer yaitu, peneliti langsung turun ke lapangan, berhubungan langsung dengan nara sumber Hakim Pengadilan Agama Klaten. Sedangkan penelitian sekunder mengacu pada isi berkas putusan nomor 1135/Pdt.g/2018/PA.Klt. dan literatur lainnya yang berkaitan dengan isi putusan tersebut.

### 5. Metode Pengumpulan Data

- a. Wawancara adalah suatu proses tanya jawab lisan, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih berhadapan secara fisik. Pengadilan Agama Klaten sebagai salah satu pihak yang bersangkutan sebagai subjek yang penulis wawancarai untuk memperoleh informasi data yang valid.<sup>8</sup> Dalam hal ini peneliti yang mewawancarai hakim yang menutup perkara, dan panitera.

---

<sup>7</sup> Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian* ( Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2007 ), hlm. 91.

<sup>8</sup> Sutrisno Hadi, *Metodologi Research* ( Yogyakarta : Andi, 2007 ), hlm. 217.

- b. Dokumentasi, merupakan teknik pengumpulan data atau mencari mengenai subjek dokumen. Dengan metode ini diharapkan peneliti mendapatkan informasi berupa berkas putusan dan foto yang berkaitan dengan pokok penelitian.

## 6. Teknik Analisis Data

Analisis merupakan upaya mencari dan menata secara sistematis catatan hasil wawancara dan lainnya untuk meningkatkan pemahaman penulis tentang kasus yang diteliti dan menyajikannya sebagai temuan bagi orang lain.<sup>9</sup>

Analisis data yang dihasilkan merupakan data kualitatif dan akan di analisis dengan metode evaluatif yaitu metode data yang dihasilkan merupakan data kualitatif dan akan dianalisis dengan metode deskriptif evaluatif dengan pola pikir induktif yaitu metode pengumpulan data untuk menetapkan apakah tujuan pelaksanaan kegiatan telah sesuai dengan tujuan yang ditetapkan. Dalam hal ini peneliti melakukan analisis isi putusan hakim nomor 1135/Pdt.g/2018/ PA.Klt. menggunakan literatur yang berkaitan dengan isi putusan yakni Fatwa DSN-MUI.

---

<sup>9</sup> Kusdiyanto, *Metodologi Penelitian* ( Bandung: Universitas Pendidikan Indonesia, Buku Pegangan Kuliah, 2010 ), hlm. 75.